

**MODUL**  
**KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA MASA ORDE**  
**BARU SAMPAI REFORMASI**  
**MATERI : KEHIDUPAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA**  
**ORDE BARU SAMPAI REFORMASI**



**MOCH. ARIFIEN**

**PPG DALAM JABATAN**  
**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**2018**

## A. Pendahuluan

Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar. Pemerintahan Soeharto sendiri bertahan selama 32 tahun dengan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mencapai cita-cita bangsa. Pada era ini pemerintahan Soeharto banyak memfokuskan pembangunan pada bidang perekonomian dan penguatan Pancasila. Soeharto kemudian mengundurkan diri pada tahun 1998 akibat pergerakan rakyat yang kemudian dikenal dengan gerakan reformasi. Reformasi merupakan gerakan yang dilakukan oleh rakyat bersama dengan mahasiswa untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Puncak pimpinan berganti ke tangan B.J Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri pasca gerakan reformasi.

Modul ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya: Pendahuluan; Capaian pembelajaran; Materi; Rangkuman; Tugas, Tes dan Daftar Pustaka. Proses pembelajaran untuk materi kehidupan sosial, ekonomi, politik masa orde baru sampai reformasi yang sedang anda ikuti saat ini, dapat berjalan dengan lebih lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut ini:

1. Pahami dulu mengenai berbagai kegiatan penting dalam modul mulai tahap awal sampai akhir.
2. Lakukan kajian terhadap materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa orde baru hingga reformasi terlebih dahulu agar anda mendapat mendapat mengkonstruksi pengetahuan lebih detail.
3. Pelajari terlebih dahulu kegiatan belajar yang akan dilakukan.
4. Keberhasilan proses belajar Anda dalam mata diklat ini sangat bergantung kepada kesungguhan Anda dalam mengerjakan latihan. Untuk itu, berlatihlah secara mandiri atau berkelompok dengan teman sejawat.
5. Bila anda menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ widiaswara pembimbing atau fasilitator yang mengajar modul ini.

Baiklah saudara pengguna modul, selamat belajar, semoga anda sukses memahami pengetahuan yang diuraikan dalam modul ini untuk bekal anda bertugas dengan baik.

## **B. Capaian Pembelajaran**

Capaian pembelajaran yang akan anda dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah anda mampu menjelaskan kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada masa orde baru sampai reformasi.

## **C. Sub Capaian Pembelajaran**

Setelah anda mempelajari modul ini maka anda diharapkan akan memiliki kemampuan dalam hal menjelaskan kehidupan ekonomi masa orde baru sampai reformasi

## **D. Materi**

### **Kehidupan ekonomi masa orde baru sampai reformasi**

Kehidupan ekonomi pada era orde baru masih diwarnai kekacauan peninggalan orde lama. Sebagai langkah awal pemerintah pada era orde baru menempuh cara: (a) Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan, (b) MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan. Langkah kongkrit yang dilakukan oleh kabinet Ampera pimpinan Soeharto saat itu membuat kebijakan : (a) Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, (b) Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian, (c) Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara : (1) Mengadakan operasi pajak, (2) Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang, (3) Penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), (4) serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara, (5) Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Seluruh perencanaan dan pembangunan ekonomi dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Rakyat hanya menjadi objek atau sasaran pembangunan. Untuk memajukan perekonomian nasional, pemerintah terus memajukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Kebijakan modernisasi pertanian pada masa Orde baru dikenal dengan sebutan

Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Revolusi Hijau (Green Revolution) merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakkan revolusi hijau ditempuh dengan cara: (a) Intensifikasi Pertanian, intensifikasi Pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani yang meliputi: Pemilihan bibit unggul, Pengolahan tanah yang baik, Pemupukan, Irigasi, Pemberantasan hama, (b) Ekstensifikasi Pertanian, ekstensifikasi pertanian, yaitu Memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru, (c) Diversifikasi Pertanian, usaha penganeka-ragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari, (d) Rehabilitasi Pertanian, merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Hasil dari usaha untuk meningkatkan hasil pertanian yang dilakukan oleh presiden Soeharto berhasil mewujudkan swasembada pangan yang terjadi di beberapa daerah.



Gambar 4. Panen Raya pada era Soeharto

Sumber : <https://bit.ly/2HW2U17>

Dalam bidang ekonomi dan pembangunan dilakukan pembangunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti

dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut : (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sedangkan delapan Jalur Pemerataan meliputi : (1) Pemerataan pemenuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan, (2) Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) Pemerataan pembagian pendapatan, (4) Pemerataan kesempatan kerja, (5) Pemerataan kesempatan berusaha, (6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, (7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air, (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pelaksanaannya pembangunan nasional pada orde baru dilakukan secara bertahap yaitu, Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun dan jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan. Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu : Pertama Pelita I. Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Sasaran yang diharapkan oleh pelaksanaan Pelita I adalah Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Kedua Pelita 2, Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Dengan strategi dasar diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan pengembangan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita

I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

Ketiga adalah pelita III. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan. Titik berat pembangunan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Adanya pemerataan hasil pembangunan ekonomi di Indonesia yang mana pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar tumbuhnya rezim Orde Baru. Pemerintah Orde Baru bukannya tidak berusaha mengatasi ketidaksesuaian rencana dan hasil pembangunan ekonomi berupa ketimpangan dan belum meratanya hasil pembangunan. Sejak Pelita III (1979–1984) terjadi perubahan pokok. Trilogi Pembangunan yang pada mulanya, urutannya ialah pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Kemudian sejak Pelita tersebut diubah menjadi pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Disusul pula dengan penancangan dua pokok kebijaksanaan pembangunan, yaitu: (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.

Keempat, adalah pelita IV. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

Kelima adalah, pelita V. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

Keenam adalah pelita VI. Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia, Indonesia kemudian juga terkena imbasnya. Pada bulan Desember 1997, turunnya nilai mata uang rupiah semakin tajam hingga menembus angka Rp. 5000. Tidak sampai pada angka itu saja, bahkan nilai mata uang rupiah terus mengalami penurunan tajam hingga Rp. 17.000/US \$ pada bulan Januari 1998. Kondisi ini mengakibatkan hancurnya bursa saham Jakarta, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, bangkrutnya perusahaan-perusahaan modern di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya PHK secara besar-besaran. Pada 1998 terjadi gerakan Reformasi yang salah satu tuntannya adalah menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah orde baru, karena selama ini orang-orang yang dekat dengan pemerintah yang mendapat kemudahan dan keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan terutama pada industri skala yang besar.

Setelah terjadi pergantian presiden dari Soeharto ke presiden B.J Habibie kebijakan dalam bidang ekonomi juga mengalami perubahan. Dalam bidang ekonomi Presiden Habibie mempunyai tiga program yaitu program jangka pendek, jangka menengah dan program jangka panjang. Tujuan program jangka pendek ini untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah. Seperti program jaringan pengaman sosial (JPS), penyediaan kebutuhan pokok rakyat serta pengendalian harga. Dalam program jangka menengah, hal-hal yang dilakukan meliputi upaya penyehatan sistem perbankan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dan kegiatan dunia usaha, khususnya investor luar negeri serta pengendalian laju inflasi dan berbagai upaya reformasi struktural untuk memperkuat landasan perekonomian nasional dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sedangkan dalam program jangka panjang sedang diletakkan landasan bagi

perekonomian yang maju, modern, mandiri dan berkualitas, terbuka bagi semua kalangan serta membangun institusi ekonomi yang berorientasi ke pasar dalam negeri dan pasar global.

Pada 1999 terjadi kembali perubahan pimpinan di Indonesia. Presiden B.J Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Pada bidang perekonomian, Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US\$. indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700. Dengan bekal ini ditambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang. Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen. Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF tak pernah mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF. Pemerintahan Abdurrahman Wahid juga memiliki gagasan sekritisasi aset yaitu aset- aset negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan dipasar modal untuk membiayai pembangunan nasional.

Pada era kepemimpinan Gus Dur terdapat peristiwa perekonomian yang mengguncang pemerintahan, yakni *bullog gate* dan *brunei gate*. Kasus Buloggate begitu terkenal karena sering kali menjerat petinggi-petinggi negara. Kasus-kasus yang melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya sejak lama sudah mengemuka. Kasus ini melibatkan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang dikelola oleh mantan Wakabulog Sapuan. Sapuan akhirnya divonis 2 tahun penjara dan terbukti bersalah menggelapkan dana non bujeter Bulog sebesar 35 milyar rupiah. Kasus ini pula yang mengantarkan Gus Dur lengser di tahun 2001. Setelah sebelumnya ia menerima dua kali memorandum DPR RI. *Brunei gate* adalah kasus penyaluran dana sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat



dengan Presiden Wahid, yaitu Ario Wowor. Keterlibatan Presiden Wahid dalam kasus itu, kata Bactiar tentu saja ada. Namun tidak ada keterlibatan Presiden meminta dana ke Brunei. "Gus Dur hanya memberi pertimbangan kepada Ario Wowor tentang pendistribusian dana. saat itu memang Ario melaporkan kepada Presiden tentang dana yang diperolehnya dari Brunei. "Ketika itu Gus Dur bilang, Ya sudah, berikan saja ke Masnuh untuk dibagikan kembali ke LSM yang membutuhkan," Selain itu kedutaan Besar Brunei di Indonesia telah menyatakan dana Rp 2 juta dolar adalah uang pribadi Sultan, dan bukan uang negara. Kejangung saat itu sudah menyimpulkan tak ada keterlibatan Presiden Gus Dur.

Setelah Gus Dur lengser pada tahun 2001, posisinya kemudian digantikan oleh wakilnya, yakni Megawati Soekarno Putri. Pada saat Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden RI yang kelima, kondisi Indonesia masih dalam keadaan krisis. Krisis ini disebabkan karena situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Banyak orang yang berpendapat, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin dalam negeri ini akan menghadapi masalah yang sangat berat, dan bagi pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah haz, masalah krisis Indonesia ini adalah tugas yang sangat berat dan harus dijalani. Tantangan terbesar pertama bagi Megawati Soekarnoputri adalah memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini mengingat rakyat Indonesia tidak percaya lagi akan usaha-usaha dan tindakan yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah krisis terus melilit. Krisis ekonomi dan politik terus berlarut-larut. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak kredibel lagi di mata masyarakat.

Untuk tetap mempertahankan negara kesatuan, pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah menentukan berbagai kebijakan, yaitu direalisasikan desentralisasi kewenangan yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dengan otonomi daerah, daerah didorong untuk mampu mengelola atau mengatur daerahnya secara mandiri. Kemandirian diharapkan mampu mendorong terjadinya percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan lain yang dibuat oleh Presiden Megawati dalam bidang ekonomi antara lain : memutuskan hubungan dengan IMF, melakukan

restrukturisasi dan reformasi keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan, meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah, kerja sama ekonomi dan politik di luar Amerika. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri terus mengalami kemajuan. Secara riil keadaan ekonomi masih belum sepenuhnya pulih, dan tingkat pengangguran masih tinggi, namun dari sejumlah indikator ekonomi makro tampak bahwa keadaan sudah menunjukkan tanda-tanda membaik. Mengingat pertumbuhan ekonomi nasional yang terpuruk pada lima tahun yang lalu akibat krisis ekonomi. Kebijakan ekonomi telah dijalankan selama tiga tahun memerintah. Masalah pokok dibidang ekonomi yang dihadapi kabinet gotong royong sejak awal adalah tidak terkendalinya fluktuasi nilai tukar rupiah, besarnya utang pemerintah dan belum tuntasnya penyehatan perbankan nasional. Hal ini berdampak pada pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Kurangnya dukungan prasarana, gangguan ketertiban dan keamanan serta ketidakpastian hukum sangat mengurangi investasi. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah stabilisasi fiskal dan perbaikan ekonomi makro serta memulihkan fungsi intermediasi perbankan. Ada sejumlah faktor penting yang ikut mempengaruhi terus menguatnya fondasi perekonomian Indonesia, yaitu kebijakan moneter yang mampu menekan angka inflasi, pengelolaan hutang luar negeri yang semakin baik dan terus menurunnya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), dan tentu saja terus membaiknya stabilitas politik dan keamanan. Berkenaan dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mendorong daerah agar menciptakan suasana yang kondusif bagi iklim investasi, serta mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan guna menarik minat investor.

Pemerintah juga mendorong daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang bisa mendorong terciptanya iklim investasi, serta mencabut atau melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan daerah yang dinilai menjadi penghambat pertumbuhan investasi. Pada sisi lain, pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja baru sekaligus peluang berusaha, utamanya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada terus ditingkatkan produktivitasnya,

agar mampu memberi kesejahteraan, membantu mempercepat pemulihan krisis dan menyerap tenaga kerja lebih besar lagi.

Krisis moneter yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa persoalan yang demikian luas. Indonesia tidak hanya dihadapkan pada beratnya tantangan beban utang luar negeri, tetapi juga semakin hancurnya sektor riil yang berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi. Di tengah pilihan ekonomi yang terbatas, pemerintahan Megawati juga dihadapkan pada tekanan defisit anggaran. Megawati Soekarnoputri tidak punya pilihan lain untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan yang secara politik tidak populer yaitu kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, tarif dasar listrik dan telepon.

Untuk menyelesaikan permasalahan KKN pada era kepemimpinan Megawati mengeluarkan Keppres tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK. KPK adalah komisi terakhir yang dibentuk pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Pembentukan KPK (Komisi anti Korupsi) mempunyai kewenangan luas dan independen. Konsekuensi dari terbentuknya Komisi Anti Korupsi adalah melikuidasi Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan menjadi bagian dari KPK. Fungsi KPKPN dan Komisi Anti Korupsi berbeda. KPKPN berfungsi sebagai filter untuk mengawasi para penyelenggara negara terhadap kemungkinan atau potensi korupsi sebelum maupun menjabat. Sementara Komisi Anti Korupsi berperan setelah ada dugaan pidana korupsi yang dilakukan seorang penyelenggara negara.